



DINAMIKA MOBILISASI PUBLIK DALAM ISU 17+8: ANALISIS RESPONS KEBIJAKAN TERHADAP KONTROVERSI KENAIKAN TUNJANGAN RUMAH DPR

Fikri Wahiddinsyah¹, Fachrul Rafiqi¹, Putu Ayu Nita Marlina¹, Jumiati Ningsih¹, Hutari Maharani Matdoan¹

¹Universitas Gadjah Mada, Sleman, Indonesia

Article Info

ABSTRAK

Article history:

Received 07 01, 2026

Revised 08 27, 2026

Accepted 09 12, 2026

Keywords:

Clicktivism; Mobilisasi
Publik; Politik Digital;
Demokrasi; Respons
Kebijakan.

Perkembangan politik digital telah mengubah pola partisipasi dan mobilisasi publik dalam merespons kebijakan pemerintah. Isu 17+8 Tuntutan Rakyat terkait kontroversi kenaikan tunjangan rumah DPR menunjukkan bagaimana aktivitas digital berkembang menjadi mobilisasi massa dan aksi fisik. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana aktivitas *clicktivism* membentuk motivasi dan kapasitas partisipasi publik hingga mendorong mobilisasi massa yang memengaruhi respons kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memadukan studi literatur, analisis data digital, dan wawancara mendalam. Data digital diperoleh melalui metadata YouTube menggunakan kata kunci “Tuntutan Rakyat” dan diolah menggunakan *Google Colab* dengan *Python*, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga peserta aksi di Yogyakarta. Analisis dilakukan melalui analisis teks dan analisis tematik dengan memadukan teori motivasi dan *clicktivism*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mobilisasi publik didorong terutama oleh motivasi intrinsik berupa rasa keadilan, tanggung jawab moral, solidaritas, dan akumulasi ketidakpuasan terhadap kebijakan publik. *Clicktivism* berfungsi sebagai *gateway participation* yang memperluas informasi, membangun solidaritas digital, dan memperkuat kesadaran kolektif. Keterbatasan ruang digital mendorong transisi menuju aksi fisik sebagai bentuk tekanan politik yang lebih nyata. Penelitian menyimpulkan bahwa mobilisasi dalam isu 17+8 merupakan sinergi antara kesadaran digital, motivasi intrinsik, dan aksi fisik, dengan *clicktivism* sebagai penggerak awal dan aksi fisik sebagai penguat tekanan terhadap pembuat kebijakan.

ABSTRACT

The development of digital politics has transformed patterns of public participation and mobilization in responding to government policies. The 17+8 People's Demands issue concerning the controversy over the increase in parliamentary housing allowances demonstrates how digital activities developed into mass mobilization and physical action. This study aims to analyze how clicktivism shapes public motivation and participation capacity, leading to mass mobilization that influences policy responses. The study employed a descriptive qualitative approach by combining literature review, digital data analysis, and in-depth interviews. Digital data were obtained from YouTube metadata using the keyword “Tuntutan Rakyat” and processed using Google Colab with Python, while primary data were



collected through interviews with three participants involved in protests in Yogyakarta. Data were analyzed using textual and thematic analysis by integrating motivation and clicktivism perspectives. The findings show that public mobilization was primarily driven by intrinsic motivations, including a sense of justice, moral responsibility, solidarity, and accumulated dissatisfaction with public policies. Clicktivism functioned as gateway participation by disseminating information, building digital solidarity, and strengthening collective awareness. The limitations of digital spaces encouraged a transition toward physical action as a more tangible form of political pressure. The study concludes that mobilization in the 17+8 issue resulted from the synergy between digital awareness, intrinsic motivation, and physical action, with clicktivism serving as an initial driver and physical action strengthening pressure on policymakers.

Corresponding Author:

Fikri Wahiddinsyah

Email: fikriwahiddinsyah@mail.ugm.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan politik digital telah mengubah cara masyarakat dalam menekan pemerintah. Kebijakan publik kini tidak hanya dibahas di ruang parlemen, tetapi juga diperdebatkan melalui layar gawai. Hal ini tampak pada polemik tunjangan rumah DPR sebesar 50 juta rupiah yang muncul di tengah situasi efisiensi anggaran dan kenaikan pajak properti (Strangio, 2025). Kebijakan ini memicu keresahan publik yang kemudian menyebar luas dari media sosial dan menciptakan gelombang protes yang berkembang menjadi aksi demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025 (Setyaningrum, 2025).

Gelombang keresahan publik ini menyebar cepat melalui platform digital utamanya setelah muncul pernyataan dari anggota DPR yang mendukung kebijakan tersebut. Penyebaran konten dan reaksi publik secara masif berkembang membentuk opini kolektif memperlihatkan bahwa digital *activism* dapat berkembang dari interaksi yang sederhana di ruang digital (*like, share, comment, repost*) memotivasi mobilisasi massa besar yang berlangsung di ruang publik. Demonstrasi besar kemudian pecah pada 25-29 Agustus 2025 melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, buruh, petani dan lainnya (Setyaningrum, 2025).

Gerakan digital tuntutan rakyat 17+8 mulai dipopulerkan oleh *influencer* dan akademisi melalui penyebaran narasi bahkan hingga menduduki *trending topic* dengan ribuan percakapan. Peran *clicktivism* melalui *like, share, comment, repost* menjadi penting dalam meningkatkan skala mobilisasi massa digital. Unggahan *influencer* seperti @Jeromepolin dan @Andovidalopez memperoleh jutaan interaksi yang menunjukkan bahwa aktivitas digital sederhana mampu menghasilkan gerakan sosial yang luas. Tekanan kolektif ini akhirnya menghasilkan dampak langsung ketika DPR menyepakati pembekuan tunjangan rumah sejak 31 Agustus 2025 dimana keberhasilan gerakan ini menunjukkan bahwa *clicktivism* sebagai aktivitas digital bukan hanya mempengaruhi ruang ekspresi namun menjadi kekuatan politik yang mampu mempengaruhi kebijakan negara.

Untuk memahami topik dinamika mobilisasi publik dalam isu 17+8 Tuntutan Rakyat memerlukan kerangka teori yang mampu menjelaskan baik faktor pendorong partisipasi individu maupun karakteristik media digital dalam mempengaruhi mobilisasi. Teori motivasi partisipasi politik, khususnya *Civic Voluntarism Model* (CVM), menekankan bahwa partisipasi dipengaruhi



oleh tiga faktor utama yaitu sumber daya, motivasi, dan mekanisme rekrutmen. Model ini menjelaskan bahwa partisipasi publik cenderung meningkat apabila individu memiliki kapasitas (waktu, keterampilan, akses), merasa memiliki efikasi politik atau suara mereka berpengaruh terhadap sebuah keputusan politik, serta terpapar ajakan partisipasi melalui jejaring sosial tertentu (Verba, Scholzman, & Brady, 1995). Selain itu, pendekatan psikologi motivasi seperti *Self Determination Theory* (SDT) memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kualitas motivasi yang mendasari tindakan kolektif. SDT menegaskan bahwa partisipasi yang bersifat berkelanjutan biasanya muncul dari motivasi intrinsik yakni dorongan moral dan identitas kolektif dibandingkan motivasi ekstrinsik yang lebih reaktif atau temporer (Ryan & Deci, 2000).

Kerangka teori tersebut perlu dipadukan dengan literatur mengenai *clicktivism*, yakni bentuk partisipasi digital yang rendah biaya seperti *like*, *share*, dan penggunaan tagar/hastag yang dapat mempercepat penyebaran isu namun memiliki ambiguitas dalam efektivitasnya terhadap perubahan kebijakan. Beberapa studi menunjukkan bahwa *clicktivism* dapat memperluas jangkauan isu dan membangun tekanan politik secara bertahap (Halupka, 2014), sementara studi lain menilai tindakan ini cenderung dangkal atau hanya di permukaan apabila tidak diikuti partisipasi secara *offline* (Christensen, 2011). Dalam konteks isu 17+8, integrasi kedua kerangka ini membantu menjelaskan hubungan antara motivasi individu, karakteristik perilaku digital, dan peluang terjadinya transisi dari reaksi *online* menuju mobilisasi publik yang mampu mempengaruhi respons kebijakan.

Meskipun berbagai studi telah membahas mengenai aktivisme digital, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada digitalisasi gerakan sosial (Abdullahi, 2024; Dumitrica & Felt, 2019; Manacorda & Tesei, 2020; Castillo-Esparcia, Caro-Castaño, & Almansa-Martínez, 2023; Agur & Frisch, 2019; Cortés-Ramos, García, Landa-Blanco, Gutiérrez, & Mesa, 2021) tanpa menjelaskan bagaimana aktivitas digital dapat memotivasi perkembangan mobilisasi massa yang besar dalam mempengaruhi kebijakan publik. Penelitian ini penting untuk dibahas untuk mengisi gap penelitian, dimana beberapa kajian sebelumnya belum banyak menjelaskan mekanisme bagaimana aktivitas digital atau *clicktivism* dapat memicu aksi fisik dan mempengaruhi respons kebijakan, khususnya di konteks Indonesia. Maka dari itu, dapat ditentukan bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana aktivitas *clicktivism* membentuk motivasi dan kapasitas partisipasi publik sehingga dapat mendorong mobilisasi massa yang mampu mempengaruhi respons kebijakan dalam kasus 17+8 tuntutan rakyat? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara motivasi publik, partisipasi digital (*clicktivism*), dan dinamika mobilisasi politik dalam mempengaruhi proses kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memadukan studi literatur, analisis data digital, dan wawancara mendalam untuk memahami hubungan antara *clicktivism* dan mobilisasi publik dalam isu 17+8 Tuntutan Rakyat (Creswell & Poth, 2018). Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, berita daring, dokumen kebijakan, serta metadata YouTube yang dikumpulkan melalui Youtube API menggunakan kata kunci “Tuntutan Rakyat” dan kemudian diolah dalam *Google Colab* dengan *Python* (Sui, Sui, & Rhodes, 2022). Sementara itu, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tiga peserta aksi di Yogyakarta untuk menggali motivasi, pengalaman digital *activism* atau *clicktivism* dan proses transisi dari partisipasi *online* ke aksi fisik langsung di lapangan. Seluruh data kemudian dianalisis dengan analisis teks untuk melihat pola narasi publik yang mencerminkan aktivitas *clicktivism*, dan analisis tematik digunakan untuk mengungkap motivasi intrinsik–ekstrinsik serta faktor kapasitas partisipasi sesuai SDT dan CVM. Selanjutnya, triangulasi teori, sumber, dan metode dilakukan untuk memastikan konsistensi temuan, sehingga hubungan antara motivasi individu, partisipasi digital, dan mobilisasi massa dapat terlihat dalam menjelaskan pengaruh *clicktivism* terhadap mobilisasi massa untuk merespon kebijakan (Krippendorff, 2013).



HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Mobilisasi dalam Tuntutan Masyarakat

Proses terjadinya mobilisasi publik yang tertuang dalam tuntutan 17+8 terjadi melalui proses elaborasi yang panjang. Berikut ini merupakan rangkaian proses mobilisasi publik tersebut.

3.1.1. Tahap *Framing* Awal oleh Aktor Digital

Proses terjadinya pergerakan dimulai dari adanya *diagnostic framing* yaitu ketika aktor digital mulai mengidentifikasi sumber masalah. Beberapa *influencer* melakukan klaim melalui akun anonim mengenai aktivitas digital serta para jurnalis yang mulai mengunggah isu tuntutan masyarakat dalam bentuk 17+8 yang menganggap bahwa pemberian tunjangan perumahan kepada DPR merupakan sebuah bentuk pemborosan. Selain itu, juga beredar unggahan provokatif dari potongan video DPR yang dibumbui dengan narasi negatif tentang mereka. Pada tahap ini, *diagnostic framing* berperan dalam menyederhanakan sebuah isu yang kompleks menjadi sebuah narasi moral yang mudah untuk dipahami. Menurut Benford & Snow (1988) menjelaskan bahwa proses ini merupakan bagian dari langkah awal dalam sebuah gerakan sosial untuk memperjelas siapa aktor yang dipersalahkan dan apa masalah utama yang dipermasalahkan. Dalam kasus ini, publik menilai bahwa DPR diposisikan sebagai aktor penyebab masalah dan masyarakat sebagai korban.

3.1.2. Tahap Penyebaran Informasi melalui Media Secara Viral Lewat Algoritma

Setelah *framing* awal, masalah tersebut bergerak secara cepat melalui skema penggunaan algoritma. *Algorithmic amplification* atau amplifikasi algoritmik adalah fenomena di mana algoritma rekomendasi atau personalisasi media sosial seperti pada *timeline* Twitter, Facebook, atau TikTok yang secara sistematis menyoroti, memperkuat, dan menyebarkan konten tertentu lebih luas daripada konten lain. Hal ini dilakukan berdasarkan kriteria seperti keterlibatan (suka, *retweet*, komentar), pola interaksi, dan preferensi pengguna. Dengan kata lain, algoritma ini tidak netral dalam memilih konten mana yang pantas dilihat oleh orang lain. Algoritma X, Instagram, dan TikTok secara otomatis memprioritaskan konten demonstrasi yang memiliki banyak pengunjung. Pola ini sejalan dengan Huszár et al. (2021) tentang penguatan konten politik yang emosional dan sensasional. Efek konten viral membuat banjir informasi, mendorong pengguna lain untuk membuat konten serupa untuk menjadi terkenal. Pada titik ini, *platform* berfungsi sebagai *co-organizer* mobilisasi secara teknis melalui mekanisme algoritma.

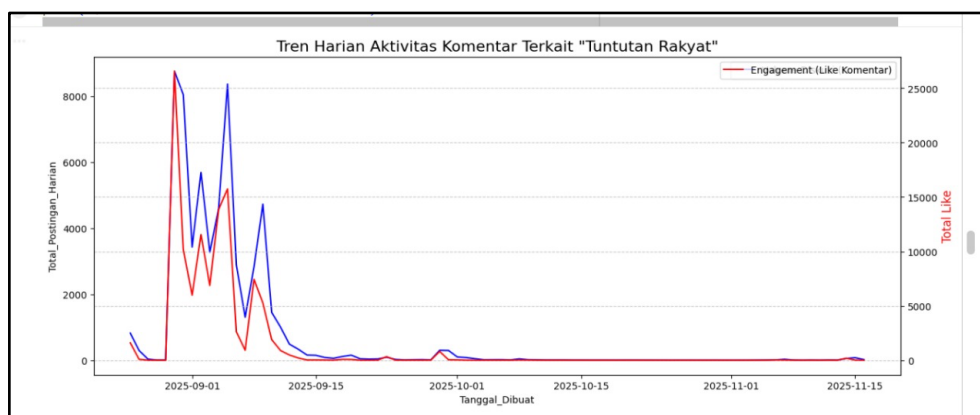
3.1.3. Tahap Pembentukan Solidaritas Digital

Setelah terjadinya distribusi informasi, munculah proses berubah dari penyebaran informasi menjadi pembentukan solidaritas. Pengguna media sosial mulai menggunakan *template*, *hashtag*, dan *meme* yang sama. Menurut Bennett & Segerberg (2012), praktik ini merupakan ciri khas *connective action*, yaitu tindakan kolektif yang tidak terpusat pada organisasi tetapi pada partisipasi personal yang dapat direplikasi. Solidaritas digital juga diperkuat melalui *collective identity formation*, di mana ketika publik merasa menjadi bagian dari perjuangan bersama. Beragam bentuk konten yang muncul video kreatif, komik satir, kritik moral, dan *thread* edukatif menjadi wadah afirmasi identitas kolektif sebagai warga yang merasa dizalimi oleh institusi elit.

3.1.4. *Clicktivism* sebagai Aksi Kolektif Awal

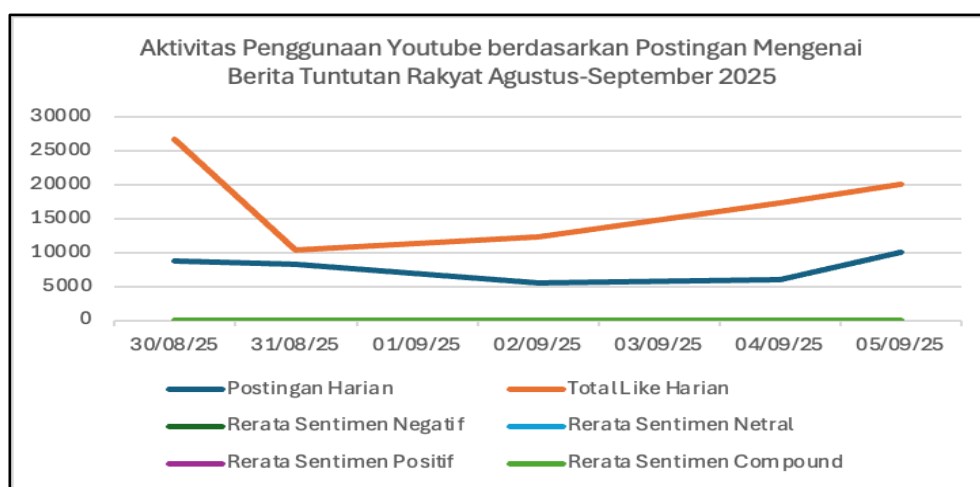
Pada tahap ini, publik atau masyarakat mulai melakukan berbagai aktivitas yang berisiko rendah, seperti menyukai konten, membagikan ulang postingan, melakukan penandatanganan petisi atau mengganti foto profil dengan menggunakan banner digital dengan tema khusus. Menurut Morozow (2011), tindakan ini disebut dengan tindakan minimal, akan tetapi dalam konteks Indonesia *clicktivism* disebut sebagai *gateway participation* yang dapat memicu terjadinya aksi digital lanjutan seperti postingan yang memberikan pressure tinggi kepada DPR, pengiriman surat-

surat protes kepada anggota dewan secara langsung, bahkan melakukan tagging akun pada akun sosial media mereka.



Gambar 1. Distribusi Peningkatan Berita Tuntutan Rakyat

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa antusiasme masyarakat terhadap pemberitaan tunjangan gaji DPR yang mengarah pada ketidakpuasan publik meningkat tajam pada akhir bulan Agustus hingga pertengahan bulan September 2025. Hal tersebut sangat relevan di mana terdapat sentimen negatif mengenai ketidakpuasan kinerja DPR meningkat. Melalui tren tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ketertarikan publik sangat tinggi yang dapat mendorong pada aksi nyata di lapangan serta memberikan tekanan terhadap pihak DPR dan pemerintah agar menyusun kebijakan yang lebih pro masyarakat dalam tempo waktu secepatnya.



Gambar 2. Postingan & Aktivitas Media mengenai Pemberitaan Tuntutan Masyarakat

Pada gambar di atas lebih detail dapat dilihat bahwa jumlah aktivitas media sosial Youtube mengalami kenaikan dan penurunan atau fluktuatif. Penurunan postingan tersebut terjadi karena adanya pembatasan terhadap beberapa isu sensitif seputar berita tuntutan terhadap DPR baik dari jumlah postingan maupun like. Akan tetapi, secara bertahap mengalami peningkatan secara konstan terhadap jumlah postingan yang ada mulai pada awal bulan September 2025. Hal tersebut dikarenakan semakin dilongkarkannya aturan pembatasan terhadap unggahan media mengenai isu yang terjadi dan tuntutan-tuntutan masyarakat. Disinilah peran clicktivism terjadi sebagai media yang mengarah ke aksi yang lebih jauh agar mendesak adanya respon dari pihak DPR dan pemerintah.



3.1.5. Timbulnya Tekanan Politik dan Guncangan Legitimasi

Puncak mobilisasi terjadi ketika narasi digital menciptakan tekanan politik nyata. Akun resmi DPR harus memberikan klarifikasi serta beberapa dari mereka harus merilis video penjelasan dan permohonan pengertian. Media arus utama ikut memperkuat sorotan publik. Tufekci (2017) menyebut fase ini sebagai *signal amplification*, yaitu ketika reaksi digital dianggap sebagai indikator legitimasi sosial sehingga aktor politik merasa terdorong untuk merespons.

3.2. Bentuk *Clicktivism* pada Isu 17+8 Tuntutan Rakyat

Pola mobilisasi digital dalam isu 17+8 Tuntutan Rakyat menunjukkan karakteristik *clicktivism* yang kuat, ditandai oleh lonjakan aktivitas klik (*like*, komentar, dan unggahan) pada periode awal munculnya isu. Berdasarkan data YouTube, yang terlihat pada gambar 1 yaitu grafik tren komentar harian memperlihatkan adanya lonjakan tajam antara 30 Agustus 2025-5 September 2025, dengan puncak mencapai lebih dari 8.000 postingan dalam satu hari. Lonjakan ini menunjukkan bahwa publik merespons isu secara cepat melalui keterlibatan digital berbiaya rendah, sesuai dengan konsep *low-threshold participation* dalam teori *clicktivism* (Halupka, 2014). Ketika kritik terhadap DPR mulai viral, tindakan mengklik yang awalnya tampak sederhana menjadi pemicu utama tersebarnya narasi ketidakadilan secara masif.

Data ini kembali diperkuat dalam gambar 2 tentang grafik jumlah postingan dan aktivitas media mengenai pemberitaan tuntutan masyarakat, menunjukkan bahwa meskipun jumlah postingan harian relatif lebih stabil, total *like* harian meningkat tajam dari 12.000 menjadi sekitar 20.000 dalam rentang lima hari. Pola persebaran data ini menegaskan bahwa *engagement* publik bukan ditopang oleh volume konten, tetapi oleh intensitas partisipasi simbolik. Hal ini konsisten dengan pendekatan Christensen (2011) yang menyebut *clicktivism* sebagai bentuk partisipasi yang menciptakan tekanan politik kumulatif. Dengan kata lain, gelombang digital bukan dihasilkan oleh banyaknya unggahan, tetapi oleh tingginya keterlibatan emosional publik melalui klik itu sendiri.

Selanjutnya, data sentimen menunjukkan dominasi sentimen negatif sepanjang periode tersebut, yang semakin memperkuat interpretasi bahwa emosi moral (*moral outrage*) menjadi pendorong utama dalam keterlibatan digital. Hal ini sejalan dengan fungsi *clicktivism* sebagai ruang ekspresi kolektif, di mana publik mengafirmasi perasaan ketidakadilan bersama melalui komentar dan reaksi emosional yang terakumulasi di ruang digital. Sentimen negatif yang stabil menandakan bahwa isu tersebut tidak hanya viral, tetapi juga mendapatkan perhatian yang tinggi di kalangan masyarakat sehingga memicu terbentuknya persatuan atau dukungan kuat di dunia digital (solidaritas digital). Pada akhirnya, data menunjukkan bahwa intensitas interaksi digital memuncak sebelum aksi fisik besar terjadi, menegaskan peran *clicktivism* sebagai *gateway participation*. Keterlibatan digital yang tinggi menghasilkan konsolidasi emosi, pembentukan identitas kolektif, dan peneguhan legitimasi narasi protes, sebelum publik memutuskan turun ke jalan. Dengan demikian, grafik YouTube mendukung analisis bahwa *clicktivism* berfungsi sebagai fondasi awal mobilisasi massa dan berkontribusi nyata dalam membentuk tekanan politik yang memaksa DPR merespons isu tersebut.

3.3. Informasi dari Aktor yang Terlibat Pada Aksi Fisik

Untuk mendukung analisis pembahasan, maka peneliti mencoba untuk menggali data dari para narasumber yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Narasumber terdiri dari 3 orang mahasiswa yang tergabung pada aksi penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR RI. Mereka khawatir bahwasanya apabila tidak dilakukan tindakan nyata melalui aksi yang terorganisir dapat menimbulkan efek domino pada sektor lain. Detail informasi mengenai aksi dan analisis pembahasan tersebut dapat dilihat pada tabel analisa berikut ini. Berikut adalah data identitas dari masing-masing narasumber yang kita gunakan sebagai acuan dalam menentukan hubungan teori motivasi dengan *clicktivism*.



Keterangan narasumber:

1. N1 : Narasumber 1
2. N2 : Narasumber 2
3. N3 : Narasumber 3

Tabel 1. Hasil Analisis Wawancara Pada Narasumber yang Terlibat Pada Aksi Fisik

Nama	Hasil wawancara	Analisis topik	Kesimpulan
N1	Informasi tentang Motivasi - Narasumber menyatakan dorongan utamanya adalah "rasa ketidakadilan" karena kebijakan tunjangan DPR dinilai "kurang sensitif terhadap situasi publik" di tengah kesulitan ekonomi. Ia menegaskan bahwa motivasinya "lebih bersifat intrinsik, terutama terkait nilai moral dan tanggung jawab sebagai warga negara", bukan karena dampak ekonomi langsung. - Rasa tidak puas ini "terakumulasi dari berbagai kebijakan sebelumnya" yang dianggap tidak melibatkan aspirasi masyarakat.	Teori Motivasi (Verba et al., 1995; Ryan & Deci, 2000) Partisipasi N1 didorong oleh <i>moral shock</i> dan motivasi intrinsik. Ini sejalan dengan konsep <i>diagnostic framing</i> (dalam makalah utama), di mana isu ini dibingkai sebagai masalah moral/ketidakadilan, bukan sekadar kepentingan perut sendiri. Akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan masa lalu menjadi bahan bakar utama mobilisasi.	Motivasi N1 bersifat ideologis dan intrinsik. Partisipasi fisiknya bukan reaksi impulsif sesaat, melainkan puncak dari akumulasi ketidakpuasan terhadap kinerja dan etika institusi (DPR) yang dinilai tidak sensitif.
N1	Clicktivism - Sebelum turun ke jalan, N1 aktif secara digital dengan "membaca, membagikan informasi, serta menonton konten penjelasan di YouTube". - Ia menilai interaksi di media sosial memberikan bukti bahwa "keresahan ini dirasakan secara luas". N1	Teori Clicktivism (Halupka, 2014) Aktivitas digital N1 (termasuk pada YouTube) berfungsi sebagai <i>gateway participation</i> atau pintu masuk. Media sosial memvalidasi perasaan pribadinya menjadi perasaan kolektif (<i>collective identity</i>). Ini mengonfirmasi bahwa clicktivism bukan aktivisme	Proses mobilisasi fisik terjadi ketika <i>clicktivism</i> dianggap tidak cukup untuk memberikan tekanan bagi para pembuat kebijakan.



	memandang clicktivism sebagai "tahap awal yang penting dalam proses mobilisasi publik" dan "ruang konsolidasi awal" untuk membangun solidaritas.	malas, melainkan fase konsolidasi informasi dan emosi sebelum aksi fisik.	Proses digital adalah pemicu dan penguat, namun aksi fisik tetap dianggap sebagai instrumen penekan utama.
N1	Proses Integratif (Transisi Digital ke Fisik) 1. N1 beralih ke aksi fisik karena merasa "partisipasi digital perlu diperkuat dengan kehadiran fisik agar pesan yang disampaikan memiliki daya tekan yang lebih besar" . 2. Ia menjelaskan hubungannya: "Motivasi pribadi menjadi dasar utama, sementara dorongan digital berfungsi sebagai penguat yang mempercepat pengambilan keputusan".	Sinergi <i>Connective Action</i> & <i>Signal Amplification</i> (Bennett & Segerberg, 2012; Tufekci, 2017) Terjadi sinergi antara motivasi internal dengan fasilitas eksternal (proses digital). Media sosial berperan sebagai akselerator atau mempercepat dan amplifier atau penguat, akan tetapi N1 merasa bahwa masih terdapat kekurangan pada <i>clicktivism</i> sehingga perlu beralih ke aksi fisik untuk menciptakan tekanan politik yang nyata (<i>political pressure</i>)	Proses mobilisasi fisik terjadi ketika <i>clicktivism</i> dianggap tidak lagi mampu untuk memberikan tekanan pada para pembuat kebijakan. Proses penyebarluasan informasi secara digital merupakan pemicu dan penguat, namun aksi fisik tetap dianggap sebagai instrumen penekan utama
N2	Informasi tentang Motivasi 1. Narasumber menyatakan dorongan utamanya adalah	Teori Motivasi (Verba et al., 1995; Ryan & Deci, 2000) Partisipasi narasumber	Motivasi N3 bersifat intrinsik dimana



	rasa keresahan terhadap kondisi pemerintahan utamanya karena pemerintah dianggap lebih mementingkan kepentingan sendiri, kurang empati, buruk dalam komunikasi dan tidak transparan dalam menangani berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat 2. Motivasinya didorong oleh rasa keadilan dimana memandang pemerintah menjalankan pemerintahan secara tidak adil dan mengambil tindakan yang sewenang-wenang, pergerseran arah kebijakan yang lebih berfokus pada kepentingan elite dan mengabaikan persoalan masyarakat.	didorong oleh motivasi intrinsik yaitu nilai moral, rasa keadilan, dan identitas kolektif sebagai bagian dari masyarakat yang dilanggar hak-haknya. Ini menunjukkan bahwa keterlibatannya bukan sekadar reaksi emosional, melainkan kebutuhan internal untuk memperbaiki ketidakadilan yang ia rasakan.	partisipasinya sebagai upaya memperbaiki ketidakadilan yang dirasakan sebagai warga negara
N2	Clicktivism 1. Narasumber aktif melakukan menyebarkan konten, menonton analisis di YouTube, dan mengikuti perkembangan isu melalui media sosial. Informasi digital tersebut membuatnya sadar bahwa tanpa perlawanan publik, pemerintah berpotensi semakin sewenang-wenang, sehingga ia memutuskan bahwa aksi digital perlu diperkuat dengan kehadiran langsung di lapangan.	Teori Clicktivism (Halupka, 2014) Aktivitas digital N2 (termasuk pada YouTube) berfungsi sebagai <i>gateway participation</i> atau pintu masuk. Dimana partisipasi digital membuka jalan menuju keterlibatan politik yang lebih dalam. Clicktivism ini membuat narasumber semakin sadar (<i>cognitive liberation</i>) bahwa pemerintah bersikap tidak adil dan bahwa masyarakat perlu melawan agar situasi tidak semakin sewenang-	Fungsi media sosial bagi N2 bukan hanya menyediakan informasi, tetapi menjadi ruang pembentuk dorongan moral dan solidaritas kolektif yang mendorong untuk beralih dari clicktivism menuju aksi fisik sebagai bentuk



	2. Komunitas online memberikan dorongan moral besar melalui penyebaran informasi mengenai ketidakadilan pemerintah, termasuk kasus driver ojol yang meninggal. Solidaritas digital ini menumbuhkan rasa kepedulian dan keyakinan bahwa masyarakat harus bersuara bersama	wenang.	tekanan politik yang lebih konkret.
N2	Proses Integratif (Transisi Digital ke Fisik) 1. Narasumber merasa aksi digital rentan dimanipulasi algoritma, sehingga kehadiran fisik dianggap lebih menunjukkan kemarahan publik. Motivasi pribadinya sebagai korban kebijakan yang tidak pro-rakyat diperkuat oleh paparan informasi digital, membuatnya terdorong untuk menyuarakan tuntutan baik secara online maupun turun langsung ke jalan. 2. Interaksi di media sosial menciptakan rasa solidaritas dan kesamaan nasib sebagai masyarakat yang diabaikan pemerintah. Hal ini meneguhkan keyakinannya bahwa mobilisasi digital mampu meningkatkan motivasi masyarakat untuk bergabung dalam aksi fisik	Sinergi <i>Connective Action</i> & <i>Signal Amplification</i> (Bennett & Segerberg, 2012; Tufekci, 2017) Transisi narasumber dari aksi digital ke aksi fisik mencerminkan prinsip <i>connective action</i>, di mana mobilisasi muncul dari keterhubungan personal melalui jejaring digital. Informasi dan emosi yang ia dapat dari media sosial membangun rasa solidaritas dan kesamaan nasib, sehingga partisipasi online berfungsi sebagai penggerak awal. Ketika narasumber menilai aksi digital mudah dimanipulasi algoritma, ia melihat kehadiran fisik sebagai bentuk tekanan yang lebih efektif.	Mobilisasi fisik N2 mencerminkan sinergi <i>connective action</i> dimana media sosial memperkuat solidaritas dan kesadaran bersama.. Karena aksi digital dianggap mudah dimanipulasi algoritma, kehadiran fisik dipahami sebagai bentuk tekanan politik yang lebih nyata dan efektif.



	sebagai bentuk tekanan nyata terhadap pemerintah.		
N3	Informasi tentang Motivasi 1. Sebagai mahasiswa Administrasi Publik, N3 memiliki motivasi yang didasari oleh analisis kebijakan yang kritis. Ia menyoroti kesenjangan ekonomi yang ekstrem antara daerah 4T (terdepan, terluar, tertinggal, termigrasi) dengan fasilitas mewah DPR. 2. Motivasinya merupakan gabungan antara intrinsik (rasa keadilan, solidaritas terhadap penderitaan rakyat di pelosok) dan ekstrinsik (tekanan ekonomi nyata seperti inflasi dan pelemahan rupiah). N3 menilai kebijakan saat ini bersifat ekstraktif (mengambil keuntungan) dan tidak inklusif, serta dipicu oleh perilaku pejabat yang arogan dan minim tata krama publik.	Teori Motivasi (Verba et al., 1995; Ryan & Deci, 2000) Latar belakang pendidikan N3 bertindak sebagai sumber daya (<i>civic skills</i>) yang membuatnya mampu membedah kebijakan secara kritis, bukan sekadar ikut-ikutan. Motivasi utamanya bersifat intrinsik, lahir dari pemahaman mendalam bahwa ada pelanggaran etika publik (<i>nirempati</i>) yang sistematis, bukan sekadar reaksi emosional sesaat.	Motivasi N3 bersifat struktural dan rasional. Partisipasinya adalah bentuk perlawanan intelektual yang dimanifestasi kan secara fisik terhadap sistem yang dinilai telah gagal menjalankan fungsi representasi dan justru memperlebar jurang ketimpangan sosial-ekonomi.
N3	Clicktivism 1. Aktivitas digital N3 sangat dipengaruhi oleh konten edukasi politik di YouTube (seperti forum diskusi, analisis tokoh publik). Ia memandang media sosial sebagai sarana literasi	Teori Clicktivism: <i>Gateway Participation & Cognitive Liberation</i> (Halupka, 2014) Aktivitas digital N3 berfungsi sebagai gerbang partisipasi (<i>gateway participation</i>). Media sosial menjadi ruang pembebasan	Media sosial bagi N3 adalah inkubator kesadaran kritis. Interaksi digital (terutama



	yang mengubah masyarakat dari tidak tahu menjadi tahu dan paham akan permainan di balik layar kebijakan. 2. N3 mengakui peran <i>clicktivism</i> (<i>like, share, comment</i>) sebagai langkah awal mobilisasi yang masif untuk membangun kesadaran kolektif (<i>collective consciousness</i>) bahwa masyarakat sedang dibodohi oleh kebijakan yang tidak masuk akal.	kognitif di mana ia dan publik memvalidasi kebenaran, menyamakan persepsi, dan membangun fondasi solidaritas yang kuat sebelum akhirnya memutuskan untuk turun ke jalan.	konsumsi konten analisis mendalam) menjadi prasyarat mutlak yang mematangkan pemahaman politiknya sebelum memutuskan untuk melakukan aksi fisik.
N3	Proses Integratif (Transisi Digital ke Fisik) 1. N3 memutuskan turun ke lapangan karena menyadari keterbatasan teknologi. Ia paham bahwa suara di media sosial rentan dibungkam oleh sensor, pemblokiran akun, atau manipulasi algoritma. 2. Ia meyakini bahwa pemerintah hanya akan merespons jika ada tekanan fisik yang nyata. Aksi fisik dianggap sebagai bukti kemarahan yang tidak bisa difilter oleh sistem komputer dan mampu menarik perhatian media internasional.	Sinergi <i>Connective Action</i> & <i>Signal Amplification</i> (Bennett & Segerberg, 2012; Tufekci, 2017) Transisi ke aksi fisik adalah strategi untuk menguatkan sinyal (<i>signal amplification</i>). N3 menyadari bahwa protes digital perlu divalidasi oleh kehadiran tubuh di jalanan agar menciptakan tekanan politik yang tidak bisa diabaikan atau dialihkan oleh pemerintah.	Mobilisasi fisik N3 adalah langkah taktis. Ia turun ke jalan untuk menutupi kelemahan aktivisme digital (yang mudah di sensor) dengan kekuatan massa nyata yang mengancam stabilitas status quo.

Hasil analisis wawancara memperlihatkan bahwa mobilisasi publik dalam isu 17+8 terkait kenaikan tunjangan rumah DPR dapat dipahami melalui keterkaitan antara teori motivasi dan clicktivism sebagai dua dimensi utama yang menjelaskan proses partisipasi. Dari sisi motivasi, ketiga narasumber (N1, N2, N3) menunjukkan dominasi motivasi intrinsik sebagaimana dijelaskan oleh Ryan & Deci (2000), yakni dorongan moral, rasa keadilan, dan solidaritas kolektif yang lahir



dari pengalaman ketidakadilan dan akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah. N1 menekankan moral shock sebagai pemicu, N2 menyoroti rasa keadilan dan identitas kolektif, sementara N3 menggabungkan motivasi intrinsik dengan analisis rasional berbasis civic skills yang memperkuat kapasitas kritik kebijakan. Dimensi motivasi ini kemudian berinteraksi dengan praktik clicktivism sebagaimana dikemukakan Halupka (2014), di mana aktivitas digital seperti membaca, berbagi atau share, dan menonton konten politik di media sosial berfungsi sebagai gateway participation yang memvalidasi keresahan individu menjadi kesadaran kolektif (cognitive liberation). Clicktivism tidak berhenti sebagai aktivisme pasif, melainkan menjadi ruang konsolidasi informasi dan solidaritas yang mendorong transisi ke aksi fisik. Ketika keterbatasan digital muncul, misalnya risiko manipulasi algoritma atau sensor. Narasumber menilai bahwa kehadiran fisik lebih efektif sebagai bentuk signal amplification dan connective action (Bennett & Segerberg, 2012; Tufekci, 2017).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa *clicktivism* menjadi titik awal mobilisasi publik dalam isu 17+8 Tuntutan Rakyat. Aktivitas digital sederhana seperti *like*, *share*, dan *comment* menyebarkan isu secara cepat melalui amplifikasi algoritma dan memperkuat persepsi ketidakadilan. Proses ini membangun solidaritas digital dan menegaskan motivasi intrinsik peserta aksi, terutama rasa keadilan dan tanggung jawab sebagai warga negara. Temuan wawancara menunjukkan bahwa *clicktivism* berfungsi sebagai *gateway participation*, yang memicu *cognitive liberation* yaitu kesadaran bahwa pemerintah perlu ditekan. Namun, narasumber melihat keterbatasan ruang digital seperti potensi sensor dan manipulasi algoritma, sehingga aksi fisik dipahami sebagai bentuk tekanan politik yang lebih efektif dan tidak dapat diabaikan.

Transisi dari digital ke fisik mencerminkan prinsip *connective action*, di mana jejaring digital menghubungkan individu dengan pengalaman dan nilai yang serupa tanpa koordinasi formal. Ketika massa hadir di ruang publik, aksi tersebut berubah menjadi sinyal politik kuat (*signal amplification*) yang mendorong DPR untuk merespons yaitu melalui pembekuan tunjangan rumah. Analisis pemberitaan juga menunjukkan bahwa meski gerakan ini mampu menghasilkan tekanan kebijakan, tingkat keberlanjutan perhatian publik cenderung menurun setelah momentum protes besar berakhir. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa mobilisasi massa dalam isu 17+8 merupakan hasil sinergi antara kesadaran digital, motivasi intrinsik, dan aksi fisik, di mana *clicktivism* menggerakkan dukungan awal, sementara aksi fisik menjadi penentu efektivitas tekanan terhadap pembuat kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, A. (2024). Impact of Globalization and Digitalization on Social Movements and Collective Action Across Different Regions and Contexts in Nigeria. *International Journal of Sociology*, 8(1), 27–40. <https://doi.org/10.47604/ij.s.2331>
- Agur, C., & Frisch, N. (2019). Digital Disobedience and the Limits of Persuasion: Social Media Activism in Hong Kong's 2014 Umbrella Movement. *Social Media + Society*, 1–12. <https://doi.org/10.1177/2056305119827002>
- Benford, R. D., & Snow, D. A. (1988). Ideology, frame resonance, and participant mobilization. *International Social Movement Research*, 1, 197–217.
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. *Information, Communication & Society*, 15(5), 739–768. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661>
- Castillo-Esparcia, A., Caro-Castaño, L., & Almansa-Martínez, A. (2023). Evolution of digital activism on social media: opportunities and challenges. *El Profesional de La Información*, 32(3). <https://doi.org/10.3145/epi.2023.may.03>



- Cortés-Ramos, A., García, J. A. T., Landa-Blanco, M., Gutiérrez, F. J. P., & Mesa, M. T. C. (2021). Activism and Social Media: Youth Participation and Communication. *Sustainability*, 13(18). <https://doi.org/10.3390/su131810485>
- Christensen, H. S. (2011). Political activities on the Internet: Slacktivism or political participation by other means?. *First Monday*, 16(2). <https://doi.org/10.5210/fm.v16i2.3336>
- CNN Indonesia. Tugas Mengawal Tuntutan 17-8 Sampai Menang. (2025, 8 Desember). Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250915125957-32-1273817/tugas-mengawal-tuntutan-17-8-sampai-menang>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dumitrica, D., & Felt, M. (2019). Mediated grassroots collective action: negotiating barriers of digital activism. *Information, Communication & Society*, 23(13), 1821–1837. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1618891>
- Firdaus, A. (2025). Apa Itu 17+8? Kenali Latar Belakang & Isinya. BBC Indonesia. Diakses 9 Desember 2025, dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqxzjq7rwxyo>
- Halupka, M. (2014). Clicktivism: A systematic heuristic. *Policy & Internet*, 6(2), 115-132. <https://doi.org/10.1002/1944-2866.POI355>
- Hendarto, Y. M. (2025). 17+8 Tuntutan Rakyat yang Meredup. Kompas.ID. Diakses 8 Desember 2025, dari <https://www.kompas.id/artikel/178-tuntutan-rakyat-yang-meredup>
- Huszár, F., Ktena, S. I., O'Brien, C., et al. (2021). Algorithmic amplification of politics on Twitter. *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 118(25).
- Krippendorff, K. (2013). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (3rd ed.). Sage.
- Manacorda, M., & Tesei, A. (2020). Liberation Technology: Mobile Phones and Political Mobilization in Africa. *Econometrica*, 88(2), 533–567. <https://doi.org/10.3982/ECTA14392>
- Morozov, E. (2011). *The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom*. PublicAffairs.
- Rainditya, D. (2025, 12 Oktober). Aksi Para Aktivis 17+8 dan Problem Gerakan Kelas Menengah. IndoPROGRESS. Diakses 8 Desember 2025, dari <https://indoprogress.com/2025/10/aksi-para-aktivis-178-dan-problem-gerakan-kelas-menengah/>
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. *American Psychologist*, 55(1), 68-78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Setyaningrum, P. (2025). Isu Demo Besar 25 Agustus 2025 Protes Tunjangan Anggota DPR, Bagaimana Faktanya? Retrieved November 15, 2025, from <https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/08/24/143650488/isu-demo-besar-25-agustus-2025-protes-tunjangan-anggota-dpr?page=all>
- Strangio, S. (2025). Indonesian Protesters Clash With Police During Demonstrations Over Parliamentary Perks. Retrieved November 16, 2025, from <https://thediplomat.com/2025/08/indonesian-protesters-clash-with-police-during-demonstrations-over-parliamentary-perks/>
- Sui, W., Sui, A., & Rhodes, R. E. (2022). What to watch: Practical considerations and strategies for using YouTube for research. *Digital Health*, 8. <https://doi.org/10.1177/20552076221123707>
- Syarifudin, T. (2025, 9 September). Mahasiswa Demo di DPR, Desak '17+8 Tuntutan



Rakyat' Dipenuhi. detikNews. Diakses 8 Desember 2025, dari <https://news.detik.com/berita/d-8103479/mahasiswa-demo-di-dpr-desak-17-8-tuntutan-rakyat-dipenuhi>

Thohirin. (2025, 15 September). Tugas Mengawal Tuntutan 17+8 Sampai Menang. CNN

Tufekci, Z. (2017). Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest. Yale University Press.

Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1pnc1k7>